

**BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA KEPADA NAURU MELALUI  
PACIFIC SOLUTION TAHUN 2001-2007**

**Oleh:** Natasha Hidayah Arifin

(email: [natashahidayah93@gmail.com](mailto:natashahidayah93@gmail.com))

**Pembimbing:** Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

**Bibliografi:** 7 Buku, 35 Jurnal, 37 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru– Pekanbaru 28293

Telp./Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This study analyzes foreign aid provided by Australia through Pacific Solution. The number of refugees and Asylum Seeker who come to Australian territory every year has a big impact on Australia. So to curb the flow of refugees, and save Australia from the threat of refugees and illegal , Asylum Seeker, the Australian state issued a policy in the form of Pacific Solution. With this policy , Asylum Seeker and refugees are transferred to detention centers spread across island countries in the Pacific Ocean, one of the country is Nauru. One of the policy application strategies is Operation Relex, which is a strategy to protect Australia's territorial borders on the high seas by intercepting, detaining and preventing ships carrying people who want to enter Australia without a visa.*

*This research applied qualitative method with data collection technique through literature study sources from books, journal, article and website that related to foreign aid and pacific solution.*

*This research show that the provision of foreign aid through the Pacific Solution policy has succeeded in restraining the flow of refugees and Asylum Seeker who come to Australian territory. To maintain Australian sovereignty from the threat of refugees and Asylum Seeker. Australia must continue to provide foreign assistance to Nauru, so that Nauru remains willing to become a shelter for refugees and , Asylum Seeker.*

**Keywords:** Foreign Aids, Pacific Solution, Refugee, Asylum Seeker, Detention Center, Operation Relex

## PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menganalisis apa kepentingan dari Australia memberikan bantuan kepada Nauru. *Foreign aid* yang pada awalnya hanyalah strategi dalam berdiplomasi jangka pendek, yaitu tepatnya hanya digunakan selama masa Perang Dingin, kemudian berubah menjadi elemen permanen dalam hubungan antar negara, membentuk norma bahwa negara yang kaya harus membantu negara yang miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>1</sup>

Namun, kita juga dapat menyadari bahwa *foreign aid* ternyata tidak hanya digunakan untuk memajukan kesejahteraan negara-negara miskin, namun juga dapat digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara pendonor. Dengan pertimbangan tersebut, maka diplomasi menggunakan *foreign aid* ini kemudian menjadi salah satu opsi dalam berdiplomasi bagi negara-negara pendonor, apalagi saat ini banyak negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk membangun perekonomian mereka. Melihat hal ini, negara pendonor melihat celah untuk masuk ke negara yang membutuhkan dengan cara memberikan bantuan agar melancarkan kepentingan nasional mereka. Negara-negara yang terletak pada kawasan Pasifik Selatan memiliki wilayah yang bisa terbilang luas yang dimana terdiri dari sebagian besar negara-negara kepulauan yang memiliki angka populasi yang rendah. Kawasan

Pasifik Selatan sebenarnya mempunyai sumber daya yang sangat potensial namun hal ini tidak dapat dikembangkan dikarenakan keterbatasan kemampuan dari manusia dan teknologi.

Hal ini menyebabkan kawasan Pasifik Selatan tidak dapat mengandalkan *self-help* sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, bantuan luar negeri menjadi instrumen utama dalam dinamika perekonomian dan perpolitikan kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu negara yang kerap menjadi pendonor di daerah kawasan Pasifik Selatan adalah Australia. Posisi Australia yang menonjol sebagai negara pendonor, kekuatan hubungan perdagangan, investasinya serta usaha dalam kerja sama dibidang keamanannya menjadikan negara Australia sebagai dominan khususnya di daerah Pasifik Selatan. Hal ini akan terus berlanjut dalam jangka yang panjang dikarenakan Australia telah menjadi negara dengan power yang besar khususnya di kawasan Pasifik Selatan selama hampir 30 tahun.

Australia mempunyai kerangka kebijakan bantuan luar negeri yang bernama “Australian Aid: Investing Growth, Stability, and Prosperity”. Kerangka ini di usulkan oleh Perdana Menteri Australia yaitu Alexander Downer. Tujuan utama yang jelas dalam bantuan luar negeri Australia adalah untuk mewujudkan kepentingan dari Australia itu sendiri dengan cara memberikan bantuan ke negara-negara berkembang untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan serta mengurangi angka kemiskinan. Bantuan luar negeri Australia lebih difokuskan lagi pada kawasan Pasifik Selatan.

---

<sup>1</sup> Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 2006, hlm.25

Australia menjalankan bantuan luar negeri dengan badan yang bernama Australian Agency For International Development (AusAID). AusAID merupakan sebuah badan pemerintah yang memiliki peran dalam mengatur segala program bantuan luar negeri Australia yang diberikan kepada banyak negara. AusAID ini merupakan bantuan dari Departemen Luar Negeri dan juga Perdagangan Australia, setelah laporan-laporan mengenai bantuan luar negeri dibuat, laporan tersebut dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri.

Bantuan Australia ini di fokuskan kepada kawasan yang sedang memiliki masalah untuk dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, perdamaian serta stabilitas kawasan. Pemerintah Australia juga akan mengambil jalan yang menurutnya terbaik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Dikarenakan adanya kepentingan nasional, dan juga keamanan regional maka Australia mempunyai kewajiban atas dasar kemanusiaan, pembangunan, keamanan serta kepentingan Australia yang lebih luas untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis kegagalan.

Salah satu negara yang mengalami krisis kegagalan adalah negara Nauru. Negara ini termasuk negara yang wilayahnya kecil dan letak yang kurang strategis sehingga membuat negara ini termasuk kedalam negara yang terisolasi. Sumber perekonomian negara Nauru didominasi oleh bantuan luar negeri yang diberikan oleh beberapa negara pendonor salah satunya ialah Australia. Nauru kerap mendapat bantuan luar negeri dikarenakan Nauru mengalami krisis ekonomi

pada tahun 1998 dan puncaknya pada tahun 2001.

Puncak dari krisis ekonomi ini ditandai oleh 3 hal. *Pertama*, nilai ekspor fosfat yang turun secara drastis hingga 83.000 metrik ton dibandingkan dengan nilai ekspor fosfat yang di tahun sebelumnya mencai 400.000-450.000 metrik ton. *Kedua*, pertumbuhan GDP Nauru yang defisit 6,8%. *Ketiga*, adanya hutang luar negeri pemerintah Nauru hingga mencapai 280 juta dolar Australia. Hal ni menyebabkan Nauru mengalami kegagalan sumber ekonomi dan menjadikan mereka sebagai negara yang mengalami *resource curse* dan *failed state*.<sup>2</sup> Setelah kegagalan tersebut mereka

Bantuan dari Australia terhadap Nauru ini dimulai pada tahun 1992 dengan jumlah bantuan AUD sebesar 2,8 juta hingga AUD 3,4 juta tiap tahunnya. Pada tanggal 10 September 2001, Australia mengadakan sebuah perjanjian yang dinamakan *First Administrative Agreement (FAA)* dengan Nauru agar bersedia menjadi *temporary host* atau rumah singgah bagi para pencari suaka.<sup>3</sup> FAA ini adalah sebuah awalan dari munculnya perjanjian *Pacific Solution*.

Negara Nauru sendiri memiliki kenaikan bantuan luar negeri dari tahun 2001-2007. Bantuan luar negeri yang didapatkan oleh Nauru pada tahun 2001 sebesar US\$710.441, pada 2002

---

<sup>2</sup> Connell, John, 2006. "Nauru: The First Failed Pacific State?", dalam The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, Vol. 95, No. 383, hal. 47 – 63

<sup>3</sup> Savitri Taylor, "The Pacific Solution Or A Pacific Nightmare?: The Difference Between Burden Shifting and Responsibility Sharing", Asian-Pacific Law & Policy Journal Vol.6 Issue I, (2005):7

mendapatkan sebesar US\$1.160.166, pada tahun 2003 sebesar US\$1.615.616, ditahun 2004 diberikan bantuan sebesar US\$1.388.048, ditahun 2005 angkanya menurun menjadi US\$ 938.262, namun pada tahun 2016 angka bantuan luar negeri kembali naik menjadi US\$1.782.843, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar US\$ 2.601.056. Nauru dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Bantuan Luar Negeri yang Diperoleh Nauru 2001-2007**

Tahun	Bantuan Per Kapita
2001	US\$ 710.441
2002	US\$ 1.160.166
2003	US\$ 1.615.616
2004	US\$1.388.048
2005	US\$ 938.262
2006	US\$ 1.782.843
2007	US\$ 2.601.056

Sumber: *The World Bank*, "Net official development assistance and official aid received (current US\$) in Nauru" <sup>4</sup>.

Dalam perjanjian tersebut dimuat beberapa hal penting yang dijanjikan Australia kepada Nauru jika negara tersebut bersedia menjadi tempat *detention centre* seperti memastikan suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik, menambah jumlah beasiswa yang diberikan kepada pelajar Nauru hingga dua kali lipat, dan juga memperluas program pengawasan zona maritime di Nauru. Hal tersebut menjadi motif bagi Nauru untuk menerima tawaran Australia.

Bantuan luar negeri Australia kepada negara Nauru memperlihatkan bahwa adanya *strategic benefits* Australia yang

besar dalam pemberian bantuan luar negerinya yang terwujud dengan adanya perjanjian *Pacific Solution* yang ditandatangani pada 27 September 2001 pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Howard membuat kebijakan yang disebut *Pacific Solution* yaitu pemindahan pencari suaka ke pusat detensi yang tersebar di negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik. Salah satu strategi aplikasi kebijakan tersebut adalah *Operation Relex* yaitu strategi perlindungan perbatasan wilayah Australia di laut lepas dengan melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa.<sup>5</sup>

Perjanjian ini sebenarnya menyiratkan bahwa Australia tidak mengizinkan para pengungsi dan pencari suaka menginjakkan kaki mereka ke wilayah teritorial Australia.<sup>6</sup>

Australia telah mengubah program bantuan luar negerinya yang tujuan awalnya adalah membantu pembangunan dan perekonomian negara menjadi jaminan dari keberlanjutan perjanjian *Pacific Solution* pada tahun 2001. Bantuan luar negeri Australia ini dianggap sebagai suap agar Nauru tetap melaksanakan perjanjian *Pacific Solution* yang digunakan Australia untuk memenuhi kepentingannya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Rahmawaty A. 2014, Pelanggaran Australia terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim.

<sup>6</sup> Savitri Taylor, "The Pacific Solution Or A Pacific Nightmare?: The Difference Between Burden Shifting and Responsibility Sharing", Asian-Pacific Law & Policy Journal Vol.6 Issue I, (2005):7

<sup>7</sup> Debra, Jonson, 2007. "Where did \$100m go? Not to the Nauruans", dalam Brisbane

<sup>4</sup> *The World Bank*.

Negara-negara yang berada di Pasifik Selatan sering sekali menjadi wadah bagi negara pendonor untuk memberikan bantuan luar negerinya.

Australia memberikan bantuan luar negerinya dengan tujuan agar Nauru dapat kembali menata negaranya dan meningkatkan kembali perekonomian yang sempat mengalami penurunan yang drastis. Namun setiap negara yang menjadi pendonor akan selalu memiliki motivasi ganda sehingga tujuan dari pemberian bantuan luar negeri ini pun memiliki kepentingan dan motif yang tersulubung yakni dengan diberikannya bantuan luar negeri oleh Australia, maka Nauru akan terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh Australia yaitu *Pacific Solution* sehingga pengungsi dan pencari suaka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan status sebagai warga negara Australia.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Foreign Aid**

Foreign Aid atau bantuan luar negeri adalah salah satu instrumen dalam kebijakan luar negeri yang telah lazim digunakan dalam praktek hubungan internasional selama berabad-abad. Bantuan luar negeri adalah pengiriman uang, barang, atau bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima bantuan.<sup>8</sup> foreign aid khususnya yang berasal

dari negara yang kuat ataupun organisasi internasional, dapat menjadi simbol dan sinyal politik. Peningkatan jumlah foreign aid seringkali menjadi tanda bahwa hubungan antara pihak pendonor dan penerima yang semakin dekat, dan juga sebaliknya ketika jumlah foreign aid menurun, maka hal tersebut menandakan hubungan mereka semakin dingin. Foreign aid juga dapat menjadi tanda bagi negara lain bahwa negara pendonor siap untuk berdiri di pihak negara penerima ketika mendapat tekanan dari negara lain yang agresif. Lancaster kemudian menjelaskan bahwa foreign aid digunakan untuk empat tujuan utama, yaitu diplomatik, developmental, bantuan kemanusiaan, serta komersial. Foreign aid bertujuan diplomatik biasanya melibatkan keamanan internasional, tujuan politik internasional, dan juga cara untuk menjaga hubungan antar pemerintah. Kedua, yaitu foreign aid bertujuan developmental yaitu bantuan yang ditujukan untuk mendukung perekonomian dan kehidupan sosial suatu negara, serta untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara penerima.

Ketiga ada bantuan yang memang ditujukan sebagai bantuan kemanusiaan. Bantuan ini merupakan bantuan yang paling tidak kontroversial karena biasanya diberikan ketika terjadi bencana alam ataupun krisis yang menyebabkan banyak korban jiwa. Keempat yaitu bantuan yang bertujuan komersial, dimana bantuan ini digunakan sebagai sarana untuk memperluas atau meningkatkan ekspor serta mengamankan akses impor bahan baku yang dibutuhkan bagi negara pendonor.

---

Times, 28 Mei 2007 diakses pada 9 februari 2022

<https://www.smh.com.au/national/where-did-100m-go-not-to-the-nauruans-20070528-gdq8ux.html>

<sup>8</sup> K.J. Holsti, 1987, terj. Wawan Juanda, "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis", Cetakan Kedua Bandung: Binacipta, p. 321.

## Level Analisis: Negara

Melihat dari judul penelitian, yaitu mengkaji kepentingan Australia memberikan bantuan luar negeri kepada Nauru, maka tingkat analisis pada penelitian ini adalah negara bangsa. Level analisis akan di fokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu keputusan Australia untuk memberikan bantuan kepada Nauru demi menjalankan kepentingan nasionalnya yaitu mengeluarkan perjanjian *Pacific Solution* yang dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pada penelitian ini aktor utama adalah Australia dilihat dari bantuan yang diberikan kepada Nauru melalui perjanjian *Pacific Solution* pada tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2007.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang berbasis pustaka atau *library research*. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari berbagai sumber seperti Buku, Jurnal, Working Paper, Dokumen Pemerintah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainya dan juga website dari sumber internet yang memiliki keterkaitan terhadap tulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Nauru Dan Problematika Sumber Daya Alam

Setelah Nauru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, 2 tahun kemudian pemerintah Nauru membeli royalti fosfat dari Australia sebesar 21 juta dolar Australia dan Nauru berhasil untuk mengelola

fosfat secara mandiri dengan bantuan *Nauru Phosphate Corporation* (NPC). Hasil dari penambangan tambang fosfat tersebut di kelola oleh pemerintah Nauru melalui *Nauru Phosphate Royalties Trust* (NPRT).<sup>9</sup> Dan setelah mampu mengelola dan megambil alih otoritas penambangan, Nauru menjadi negara paling kaya di dunia dengan estimasi 100 juta dolar hingga mencapai 800 juta dolar Australia.

Adanya pemasukan dalam jumlah besar tersebut membuat pemerintah mampu untuk menyediakan segala kebutuhan masyarakat seperti konsumsi, kesehatan, pendidikan serta jasa dan infrastruktur publik lainnya tanpa dipungut biaya. Hal ini mnegakibatkan penduduk menjadi menganggur, dan barang-barang yang dibutuhkan dapat didapat melalui impor. Negara Nauru juga tidak melakukan investasi di bidang lain, negara ini hanya mengandalkan pendapatan dari hasil fosfat yang dikira akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama.<sup>10</sup>

Pada saat Nauru memiliki kendali penuh terhadap eskplorasi fosfat, proses penambangan yang dilakukan oleh negara Nauru telah merusak setidaknya sepertiga dari wilayah Nauru. Hal ini berdampak besar dikarenakan wilayah Nauru yang tergolong kecil sehingga penambangan fosfat yang semakin lama semakin mengurangi tanah luas

---

<sup>9</sup> Connell, John, 2006. "*Nauru: The First Failed Pacific State?*", dalam *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs*, Vol. 95, No. 383,

<sup>10</sup> Connell, John, "*Nauru: The First Failed Pacific State?*"

yang subur dan membuatnya menjadi *wasteland* dengan gas beracun yang menyebar membuat lingkungan rusak dan mengakibatkan 80% daerah pulau ini tidak ada habitatnya. Para satwa liar pun pergi meninggalkan pulau ini karena keberadaan pertambangan fosfat. Penduduk Nauru yang bekerja di perusahaan *Nautu Phosphate Corporation* ini sangat sedikit, hal ini dikarenakan masyarakat Nauru telah dimanjakan oleh pemerintah sehingga malas untuk bekerja.

Penduduk Nauru bergantung pada pekerja yang mayoritasnya di impor dari Kiribati dan Tuvalu. Pemerintah menaruh harapan bahwa pendapatan dari hasil fosfat ini akan bersifat substantif dan investasi luar negeri akan mencukupi ketika cadangan dari fosfat ini habis.<sup>11</sup> Tentu saja, ekspektasi dari pemerintah tersebut tidak menyusun rencana ekonomi di sektor alternatif non-fosfat yang sangat memerlukan manusia yang berkualitas baik dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang panjang.

Nauru mulai mengalami penipisan fosfat dan pada tahun 2006, tambang-tambang besar di Nauru ditutup karena kehabisan fosfat. Krisis yang dialami Nauru menyebabkan negara ini mengalami pertumbuhan GDP negatif dari awal 1990-an hingga 2007. Penurunan ekspor fosfat diikuti oleh kegagalan investasi Nauru di beberapa negara, manajemen keuangan yang buruk dan dana NPRT yang dikorupsi besar-besaran oleh pegawai pemerintah. Hutang luar negeri yang

telah mencapai 200 juta dolar Australia membuat pemerintah mulai menjual propertinya ke luar negeri dan membuat rencana untuk menghemat pengeluaran. Korupsi dan pengelolaan keuangan pemerintah yang buruk juga merupakan faktor kunci dalam krisis ekonomi yang terjadi di Nauru. Salah satu contohnya adalah Nauru tidak memiliki rencana ekonomi jangka panjang sejak kemerdekaan.<sup>12</sup>

Anggaran Nauru mengalami defisit sejak 1990-an. Pada tahun fiskal 1997 hingga 1998, pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 15 persen dan tetap pada tingkat ini. Peningkatan pengeluaran ini tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran yang kronis. Pada tahun fiskal 2003, defisit anggaran diperkirakan sekitar A\$15,2 juta, sedangkan untuk tahun fiskal 2004 defisit diperkirakan meningkat menjadi A\$22 juta. Pemerintah berturut-turut telah membiayai defisit fiskal ini dengan meminjam dari *Nauru Phosphate Royalties Trust*, *Nauru Phosphate Corporation* dan *Bank of Nauru*.<sup>13</sup>

Pembiayaan defisit ini memiliki implikasi yang merugikan bagi organisasi-organisasi ini. Nilai NPRT telah menurun dari A\$1,3 miliar pada tahun 1990 menjadi sekitar A\$300 juta saat ini—penurunan nilai sebesar 77 persen secara nominal. Demikian juga, pembiayaan defisit anggaran Bank of Nauru telah menekan cadangannya,

---

<sup>11</sup> Rahma Dwi Wulandari, “*Bantuan Luar Negeri Australia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Nauru Tahun 2001-2007*”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016

---

<sup>12</sup> J. Squires, 2008, “The Constitutive Representation Of Gender: Extra-Parliamentary Re-Presentations Of Gender Relations”, *Journal of Representative Democracy* Volume 44, 2008

<sup>13</sup> Teuea Toatu, “*Keeping The Nauru Economy Afloat*” *Pacific Economic Bulletin* Volume 19 Number 2 2004 hal.124

membuatnya tidak mampu mempengaruhi transaksi internasional dan memenuhi tuntutan penarikan deposit.<sup>14</sup> Menurut standar internasional, Bank of Nauru secara teknis bangkrut. Karena dana lembaga keuangan ini telah habis, pemerintah hanya memiliki sedikit pilihan untuk membiayai operasinya.

Penting digaris bawahi bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu merupakan hal yang buruk selama digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Namun, jika pengeluaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi seperti upah sektor publik yang tinggi, tunjangan perjalanan ke luar negeri yang boros, atau tunjangan menteri seperti yang telah terjadi hingga saat ini dengan pemerintah Nauru yang dilakukan secara terus menerus, hal ini membuat negara Nauru rentan terhadap krisis fiskal.

Untuk mengatasi kebangkrutan negara ini, pemerintah negara melakukan langkah-langkah yang hanya menyelamatkan diri sebentar dan malah terkena dampak yang lebih besar. Sebelumnya Nauru telah melakukan Investasi Miliaran US\$ di Australia tetapi karena manajemen keuangan yang sangat buruk maka Investasi Miliaran US\$ tersebut sekarang hanya bernilai puluhan juta US\$ saja.

Pada bulan Desember 2005 hingga September 2006, Nauru menjadi terisolasi dari dunia luar,

---

<sup>14</sup> Asian Development Bank, 2004. "Asian Development Outlook 2004—Economic Trends and Prospects in Developing Asia", The Pacific. Asian Development Bank, Manila

karena *Air Nauru* yang sebelumnya menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke Nauru, memutuskan untuk berhenti beroperasi. Satu-satunya jalan keluar dari Nauru adalah kapal laut. Maskapai penerbangan tersebut akhirnya kembali dapat beroperasi dengan nama *Our Airline* dibawah bantuan dana dari Republik Cina. Nauru hanya memiliki sebuah bandara udara, Bandar Udara Internasional Nauru.<sup>15</sup> Pemotongan subsidi juga menjadi cara yang dianggap ampuh dalam memecahkan masalah hampir bangkrut ini. Rakyatnya mulai merasakan kemewahan yang diambil dengan cara pelan-pelan ini.

Nauru sekarang berkerja sama dengan Australia sebagai tempat penampungan imigran gelap yang memasuki Australia. Nauru melakukan kesepakatan ini dengan bayaran Pemerintah Australia stok bahan bakar, biaya pengobatan, dan juga akomodasi bagi pengungsi. Pemerintah Australia tentu saja dengan senang hati menerima penawaran itu. Namun tanpa sadar Nauru sekarang telah menjadi tempat pusat detensi yang dimana pengungsi dan pencari suaka ilegal akan diarahkan ke Nauru sehingga menyebabkan keamanan di negara Nauru semakin terancam. Melihat hal ini, Australia melihat sebuah peluang untuk menjalankan kepentingan nasionalnya dengan memberikan bantuan luar negeri kepada Nauru. Bantuan luar negeri yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi negara pendonor,

---

<sup>15</sup> Burhanuddi, "Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya Dalam Percaturan Global", Vol. 1, No. 1, Juli 2015

namun mayoritas negara pendonor dalam pemberian bantuan luar negerinya tidak harus selalu termotivasi pada tanggung jawab moral tersebut. Terdapat motivasi ganda (*dual motivation*) antara bantuan luar negeri sebagai bentuk nyata kemanusiaan dan sebagai fungsi melancarkan kepentingan nasional negara pendonor.

### Ancaman Pengungsi dan Pencari Suaka yang Masuk ke Australia

Australia sebagaimana negara-negara maju lainnya memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara.. Selain itu, terdapat kepercayaan diantara para pengungsi dan pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapatkan status pengungsi di Australia dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini lah yang membuat motivasi para pengungsi dan pencari suaka semakin besar dan membuat mereka berusaha untuk sampai ke Australia dengan berbagai cara.

Australia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya.

Secara keseluruhan, terdapat dua gelombang kedatangan para pengungsi dan pencari suaka ke Australia yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu

disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pengungsi dan pencari suaka yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di negara Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara tersebut.

Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship (DIAC)* memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal.<sup>16</sup> Masalah mengenai imigran ilegal ini terus terjadi dari tahun ke tahun khususnya imigran ilegal atau pencari suaka yang berusaha masuk ke Australia menggunakan perahu.

Berdasarkan data Badan Pengungsi Australia, pada tahun 1995-1996 terdapat 16 kapal dan 903 pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia, tahun 1997-1998 terdapat 28 Kapal dan 540 pengungsi, tahun 1999-2000 terdapat 137 Kapal dan 6.701 pengungsi, 2001 terdapat 32 Kapal dan 3694 pengungsi.

**Tabel 3.1 Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Australia pada Tahun 1995-2001**

Tahun	Jumlah Kapal	Jumlah Pengungsi
1995	7 Kapal	242 Orang
1996	9 Kapal	661 orang
1997	11 Kapal	340 Orang
1998	17	200

<sup>16</sup> Parliament of Australia, diakses dari [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05) pada 2 Juni 2022

	Kapal	Orang
1999	86 Kapal	3740 Orang
2000	51 Kapal	2961 Orang
2001	32 Kapal	3694 Orang

Sumber: Refugee Council of Australia.<sup>17</sup>

Persoalan imigran yang sampai saat ini terus meningkat dan membutuhkan perhatian yang serius dan menjadi prioritas utama negara dalam mengatasinya, karena tidak sedikit para imigran ilegal melakukan perjalanan laut dari negara yang bertetangga dengan Australia sehingga sangat strategis jika dilalui dengan jalur laut.<sup>18</sup> Bagi Australia kehadiran pencari suaka yang terus meningkat angkanya sehingga menjadi beban tersendiri bagi kedaulatan dan keamanan negara Australia.

Angka jumlah migrasi yang meningkat akan menimbulkan resiko munculkan penyelundupan orang pun semakin besar. Penyelundupan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang saat ini sedang marak terjadi.<sup>19</sup> Pemerintah Australia beranggapan masalah penyelundupan manusia lewat laut ini akan mengancam kedaulatan

wilayah Australia. Alasan yang memaparkan bahwa penyelundupan manusia sebagai ancaman utama bagi masyarakat Australia yaitu: **Pertama**, adanya persoalan serius terhadap keamanan dan keprihatinan akan adanya tindak kriminal ketika orang-orang yang datang ke Australia tetapi tidak memiliki identifikasi yang jelas. **Kedua**, terdapat resiko karantina terhadap pemeriksaan kesehatan bagi warga biasa yang akan melewati proses imigrasi. **Ketiga**, pemrosesan terhadap imigran ilegal menimbulkan masalah biaya dan logistik yang signifikan. **Keempat**, penyelundupan manusia dapat melanggar kedaulatan Australia, sehingga mengganggu kedaulatan negara dalam mengontrol perbatasan negaranya.<sup>20</sup>

### Permasalahan Sosial yang Ditimbulkan Oleh Pengungsi dan Pencari Suaka

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam komponen pertimbangan dalam proses negosiasi pembuatan kebijakan termasuk juga perjanjian internasional yang akan dibuat. Dalam hubungannya dengan permasalahan alasan Australia bekerja sama dengan negara-negara disekitar atau yang berdekatan, ada baiknya kita melihat dulu masyarakat Australia dalam memandang permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Melihat kembali masyarakat sebagai aktor dimana Masyarakat Australia sangat prihatin terhadap permasalahan tentang pengungsi dan

<sup>17</sup> Refugee Council of Australia, diakses dari <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/> pada 9 Juni 2022

<sup>18</sup> Vivanews, "Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/53394-indonesia-jadi-tempat-transit-imigran-gelap> diakses pada 3 Juni 2022

<sup>19</sup> Sartika Soesilowati, "Sekuritisasi 'manusia perahu': efektifkah?", Departemen hubungan internasional, Universitas Airlangga, diakses dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jgs173964b502full.pdf> pada 7 Juni 2020

<sup>20</sup> Australian Federal Police (AFP). "People Smuggling", diakses dari <http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking/people-smuggling.aspx> pada 7 Juni 2022

pencari suaka. Dengan begitu ketika ada kebijakan mengenai permasalahan tersebut, masyarakat Australia pasti langsung menyurutinya termasuk ketika ada masalah baru yang timbul juga. Selain itu mengindikasikan bahwa sebenarnya ada permasalahan dalam masyarakat Australia menyangkut para pencari suaka tersebut yang menyebabkan mereka sangat perhatian terhadap kasus ini. Opini dari masyarakat Australia mengenai permasalahan pengungsi dan pencari suaka tersebut, sangat jelas bahwa sebagian besar masyarakat menganggap masalah pengungsi dan pencari suaka ini akan membawa dampak bagi keamanan nasional. Dengan demikian tidak mengeherankan bahwa sebagian besar dari mereka juga setuju adanya detention camp bagi setiap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia. Kemudian lebih dari setengah masyarakat bahkan menolak pernyataan bahwa Australia seharusnya mempunyai kewajiban atas penanganan konvensi tentang pengungsi. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Australia menolak kehadiran pengungsi dan pencari suaka dinegaranya. Hal ini tentunya mendorong opini publik dan menekankan pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan tegas termasuk menolak dan memindahkan pengungsi dan pencari suaka ke negara lain. Dengan demikian pemerintah juga memasukan opini publik ini sebagai salah satu input dalam proses pembuatan kebijakan.

Penolakan sebageian besar masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka ini tentunya memiliki alasan terutama dalam permasalahan sosial. pengungsi dan pencari suaka yang

jika diterima permohonannya maka akan menjadi status pengungsi dimana mereka boleh bergabung dengan masyarakat Australia dan beraktifitas layaknya warga negara. Banyaknya pengungsi yang ada di Australia ini tentunya menimbulkan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat. Yang pertama, terdapat permasalahan Bahasa. Ini merupakan masalah besar dengan implikasi yang signifikan para imigran berkomunikasi secara 'tertulis dan lisan' terutama ketika para migran dan pengungsi berasal dari negara yang bahasa ibunya tidak sama dengan bahasa Inggris seperti bahasa-bahasa Eropa Timur Asia, Afrika.

Yang kedua, hambatan budaya menjadi seorang migran usia dewasa atau pengungsi, hambatan budaya menjadi ancaman sangat serius terhadap kemungkinan mencari pekerjaan. Secara keyakinan yang berbeda, cara berfikir yang berbeda dan berperilaku dan memiliki sikap yang berbeda membuat hidup mereka, pada waktu sangat traumatis. Prosedur seleksi pekerjaan untuk mencari pekerjaan birokrasi yang terlibat dalam memulai bisnis baru dalam masyarakat ini pengalaman baru bagi pendatang baru ini usia matang. Banyak yang akan mengalami kesulitan membiasakan diri dengan aturan-aturan hukum, akuntansi dan industri serta peraturan lainnya. Yang ketiga, kurangnya pengalaman kerja, masyarakat Australia biasanya mencari staf baru dengan beberapa pengalaman untuk memenuhi kualifikasinya. Hal ini tentu saja memuat imigran yang tidak memiliki pengalaman bekerja akan susah untuk menemukan pekerjaan.

Selanjutnya adalah Rasisme. Ini adalah satu lagi hambatan utama yang dihadapi oleh migran dalam mencari pekerjaan atau memulai bisnis baru. Dalam banyak kasus rasisme menghilangkan migran kesempatan pelatihan dan pendidikan. Diskriminasi dalam mengakses pekerjaan tentu ada atas dasar etnis, agama, dan budaya. Hal-hal tersebut pada akhirnya menyebabkan para penghungsi yang statusnya menjadi migran tersebut tidak dapat bekerja atau banyak yang menjadi pengangguran. Tentunya ini menyebabkan permasalahan sosial dikalangan masyarakat Australia yang tampaknya terganggu dengan kehadiran para pencari suaka tersebut.<sup>21</sup>

### **Kebijakan Australia Mengenai *Pacific Solution***

Di awal terpilihnya Jhon Howard sebagai perdana Menteri Australia di tahun 1996, jumlah kedatangan manusia perahu ke Australia meningkat secara signifikan. Hal ini mendorong Jhon Howard untuk menerapkan kebijakan dengan tujuan sekuritisasi wilayah teritorial Australia dari kedatangan manusia perahu “*boat people*” yang kemudian dikenal dengan *Pacific Solution*. Kebijakan *Pacific Solution* diawali dengan insiden Tampa yang terjadi di Bulan Agustus 2001 akibat meningkatnya jumlah kedatangan manusia perahu. Insiden Tampa ini adalah insiden yang terjadi 26 Agustus 2001 dimana kapal MV Tampa milik Norwegia membawa 433 manusia perahu yang mayoritas berasal dari Afghanistan untuk

---

<sup>21</sup> Mar'iyah, Chusnul. 2005. Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral. Jakarta: Granit.

memasuki kawasan teritorial Australia.<sup>22</sup>

Manusia perahu yang dibawa oleh MV Tampa ini merupakan manusia perahu yang ingin berlayar menuju Australia tetapi harus terhenti dikarenakan kapal mereka mengalami kerusakan dan terombang-ambing ditengah lautan. MV Tampa yang pada saat itu berada di dekat perahu nelayan yang digunakan oleh manusia perahu ini kemudian memindahkan 433 manusia perahu ke kapal MV Tampa dengan tujuan awalnya menuju Indonesia sebagai negara transisi. Namun dalam perjalanan menuju Indonesia terdapat beberapa manusia perahu ini enggan untuk dibawa ke Indonesia dan mengancam untuk bunuh diri hingga akhirnya MV Tampa mencoba untuk membawa manusia perahu ini menuju Australia. Meliat hal tersebut pemerintah Australia menolak kedatangan kapal MV Tampa ini dikarenakan para manusia perahu ini sebagian besar adalah etnis Hazara (etnis dari Afganistan) yang dianggap illegal. Pemerintah Australia melarang kapal tersebut masuk kedalam teritorial Australia dan menyuruhnya kembali ke Indonesia dengan mengutus 45 anggota Special Air Services Forces.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Savitri Taylor, “The Pacific Solution Or A Pacific Nightmare?: The Difference Between Burden Shifting and Responsibility Sharing”, Asian-Pasific Law & Policy Journal Vol.6 Issue I, (2005):13

<sup>23</sup> Alex Reilly, Australian politics explainer: the MV Tampa and the transformation of asylumseeker policy, 2017, The Conversation, diakses pada 2 Agustus 2022 <https://theconversation.com/australian-politics-explainer-the-mv-tampa-and-the-transformation-of-asylum-seeker-policy-74078>

Dampak dari insiden ini, hubungan bilateral antara Australia dan Norwegia menjadi tidak baik hingga berakhir pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara. Disatu sisi hubungan Australia dengan Indonesia menjadi memanas pasca kasus Timor Leste, karena Jhon Howard dinilai terlalu menyalahkan pemerintah Indonesia sebagai negara transit tidak melakukan kewajibannya dengan membiarkan manusia perahu memasuki wilayah teritorial Australia. Insiden ini membuat Jhon Howard segera memantapkan *Pacific Solution* dengan waktu satu bulan setelah insiden Tampa terjadi yaitu 27 September 2001.<sup>24</sup>

Howard membuat kebijakan yang disebut *Pacific Solution* yaitu pemindahan pencari suaka ke pusat detensi yang tersebar di negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik.<sup>25</sup> Pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, arah kebijakan Australia tentang para pencari suaka dengan mengeluarkan *Pacific Solution* bisa dikatakan sangat pragmatis. Kebijakan *Pacific Solution* tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Australia untuk mencegah dan mengendalikan laju kedatangan para pencari suaka yang hendak masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia, Philip Ruddock pada tanggal 27 September 2001.

---

<sup>24</sup> Graeme Hugo, Globalization and changes in Australian international migration, *Journal of Population Research* 2006, 107, p. 125–126. Diakses pada 2 Agustus 2022 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1/imre.12120>

<sup>25</sup> Rahmawaty A. 2014. Pelanggaran Australia terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?. *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*

Kebijakan *Pacific Solution* terdiri dari tiga strategi utama. **Pertama**, penetapan dan perubahan zona migrasi Australia.<sup>26</sup> Melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC), pemerintah Australia memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang dengan menggunakan perahu dianggap sebagai imigran ilegal dengan sebutan *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs). Dalam upayanya untuk mencegah datangnya para IMAs tersebut, dalam kebijakan *Pacific Solution*, salah satu strategi utama pemerintah Australia adalah dengan melakukan perubahan zona migrasi Australia.

Zona migrasi sebagai pusat detensi di Australia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Sebelum tahun 1992, dalam undang-undangnya, Pemerintah Australia mengizinkan penampungan para pencari suaka yang berada di wilayah Australia tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Kemudian tahun 1999, diperkenalkanlah undang-undang yang meningkatkan hukuman terhadap pelanggaran penyelundupan manusia dan mencegah pengiriman informasi mengenai hak bantuan hukum bagi para pencari suaka. Namun undang-undang tersebut dianggap belum memberikan solusi yang signifikan dalam mencegah kedatangan para pencari suaka ke Australia. Pada tahun 2001 melalui kebijakan *Pacific Solution*, pemerintah Australia kembali memperketat ruang gerak para

---

<sup>26</sup> Adi P. Suwecawangsa, “Kebijakan Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Pengungsi dan pencari suaka) Berupa *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders* (OSB), diakses pada 4 September 2022 <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/18860/>

pencari suaka dengan perubahan zona migrasi di wilayah teritori Australia.

Dalam aturan baru tentang zona migrasi Australia, salah satu cara Australia untuk memproteksi keamanan perbatasan dan kedaulatan negaranya adalah dengan menghilangkan zona migrasi di wilayah Australia. Australia juga melakukan beberapa amandemen terhadap *Migration Act 1958*, dengan mengurangi hak-hak pengungsi dan merubah zona migrasi yang awalnya berada di pulau-pulau kecil Australia menjadi di luar teritorial Australia. Amandemen tersebut dilakukan pada tanggal 26 September 2001, hasil amandemen tersebut adalah bahwa pengungsi yang mendarat di pulau-pulau ini (Pulau, Christmast, Pulau Ashmore, Pulau Cartier, dan Pulau Cocos) tidak diperbolehkan untuk mengajukan aplikasi visa, termasuk permintaan suaka. Satu-satunya kesempatan untuk tetap bisa berada di wilayah Australia adalah dengan mendapatkan izin khusus dari Menteri Imigrasi, yang keputusannya tidak bisa ditinjau ulang.<sup>27</sup>

**Kedua,** *Operation Relex* yang dilakukan oleh *Australian Defense Force*. *Operation Relex* adalah salah satu dari tiga strategi utama dalam *Pacific Solution*, yaitu strategi perlindungan perbatasan wilayah Australia di laut lepas dengan cara melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan perahu yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa. Pasukan Pertahanan Australia (*Australian Defense Force*) memulai

*Operation Relex* dengan cara menghalau perahu-perahu yang membawa *Irregular Maritime Arrivals* yang mencoba memasuki teritori Australia. *Operation Relex* dimulai pada September tahun 2001, dengan kasus pertama yaitu digagalkannya 13 perahu yang membawa para pencari suaka oleh *Australian Defense Force* yang hendak masuk ke Australia, diantaranya empat perahu dicegat dan dikembalikan ke Indonesia sebagai negara embarkasi, lima perahu ditahan kemudian dikirim ke Nauru, dua perahu dikirim ke pulau Christmast kemudian dialihkan juga ke Nauru dan dua perahu lagi ditenggelamkan.<sup>28</sup>

Pengamanan kawasan maritim Australia membutuhkan berbagai kemampuan untuk pengawasan, patroli dan respon terhadap perahu-perahu yang membawa para pencari suaka atau *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs), serta pengawasan terhadap pesawat terbang dan sistemnya. Melihat pentingnya pengawasan terhadap wilayah maritimnya, Pemerintah Australia sampai menggunakan kapal perang dan pesawat tempur dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap wilayah maritimnya.<sup>29</sup>

**Ketiga,** kerjasama dengan negara dunia ketiga di kawasan Pasifik Selatan. Kebijakan sekuritisasi Australia tentang para pencari suaka berupa *Pacific*

---

<sup>27</sup> Wood J. A. 2001 The Pacific Solution: Refugees Unwelcome in Australia. Diakses pada 2 juni 2022  
<<http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3wood.pdf>>

---

<sup>28</sup> Tanzalia E. 2014. Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMAs) tahun 2001-2008. JOM FISIP Vol. 2 No.2 Diakses pada 2 Juni 2022

<sup>29</sup> Bergin, Anthony and Sam Bateman. 2005. Future unknown: The terrorist threat to Australian maritime security. Australian Strategic Policy Institute. Canberra.

*Solution*, selain memaksimalkan peran militer dan penghapusan zona migrasi di wilayahnya guna menekan jumlah Irregular Maritime Arrivals (IMAs) adalah dengan membentuk sebuah kerjasama dengan negara lain di kawasan Pasifik Selatan. Inti dari kerjasama ini adalah dengan membangun sebuah pusat detensi bagi para pencari suaka dalam prosesnya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Negara Australia dalam hal ini bekerjasama dengan Negara Nauru dan Papua New Guinea (PNG) untuk membangun pusat detensi tersebut.

Dalam kerjasamanya dengan dua negara tersebut, Negara Nauru dan Papua New Guinea (PNG) sepakat untuk melakukan pengolahan lepas pantai sebagai pusat detensi bagi para pencari suaka. Pencari suaka yang datang tidak ditahan berdasarkan hukum Australia, ataupun hukum Nauru atau Papua New Guinea, tujuan khusus negara-negara tersebut bukanlah memberikan visa tetapi memfasilitasi pencari suaka untuk tinggal sementara sambil menunggu proses dan transmigrasi atau kembali ke negaranya.<sup>30</sup>

*Pacific Solution* sendiri merupakan rangkaian kebijakan yang baru dibuat partai koalisi untuk menghadang laju kedatangan manusia perahu ke Australia. Dalam menerapkan kebijakan ini Australia menjunjung tinggi prinsip “*no advantages*” dimana pencari suaka khususnya manusia perahu tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan usaha yang mereka

lakukan dengan mengarungi laut tidak akan sebanding dengan resiko yang mereka terima. Diharapkan dengan kebijakan ini, manusia perahu akan mengurungkan niatnya untuk mengarungi lautan untuk mencapai wilayah Australia.

Kebijakan ini dinilai efektif dalam menghadang datangnya pencari suaka yang mencoba memasuki wilayah teritori Australia dengan melibatkan angkatan laut Australia. Langkah lain yang dilakukan dalam rangkaian kebijakan *Pacific Solution* adalah dengan menjalin kerjasama dengan Papua New Guinea dan Nauru sebagai partai ketiga. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan Papua New Guinea dan Nauru dapat dijadikan sebagai tempat untuk membangun *detention camp* bagi pencari suaka yang tertangkap melalui *Operation Relex*.<sup>31</sup>

Sebenarnya Australia tidak hanya meminta bantuan pada Papua New Guinea dan Nauru, ada beberapa negara di kepulauan pasifik lainnya seperti Kiribati, Tuvalu, Tonga dan Fiji. Kiribati bahkan memberikan respon positif terhadap rencana Australia dengan menjadikan Kiribati sebagai salah satu negara penerima pencari suaka. Australia pun sempat melakukan inspeksi di pulau Kanton di kepulauan Phoenix pada 7 Oktober 2001, tetapi akhirnya batal karena pulau ini dinilai terlalu terisolasi untuk memberikan bantuan logistik. Akhirnya Nauru dan pulau Manus di Papua New Guinea resmi ditunjuk

---

<sup>30</sup> Phillips, J. 2012. Parliament of Australia, Department of Parliamentary Service. The ‘Pacific Solution’ Revisited: a Statistical Guide to The Pengungsi dan pencari suaka Caseloads on Nauru and Manus Island.

---

<sup>31</sup> The Sydney Morning Herald, “Secret file: Operation Relex,” *The Sydney Morning Herald*, 28 Oktober 2022, diakses pada 1 Agustus 2022  
<https://www.smh.com.au/national/secret-file-operation-relex-20021028-gdfrkt.html>

sebagai partai ketiga dalam kerjasama tersebut dan akan segera didirikan *offshore processing center* di kedua tempat tersebut.<sup>32</sup>

Australia menjanjikan kepada Nauru negara tersebut bersedia menjadi tempat *offshore processing center* seperti memastikan suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik, menambah jumlah beasiswa yang diberikan kepada pelajar Nauru hingga dua kali lipat, dan juga memperluas program pengawasan zona maritime di Nauru. Hal tersebut menjadi motif bagi Nauru untuk menerima tawaran Australia.

Pada saat itu, Nauru sempat menarik perhatian internasional akan kebijakan migrasinya yang memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia. Australia dan Nauru melakukan perjanjian tersebut sehingga menjadikan Nauru sebagai salah satu wilayah pusat detensi bagi para pegungsi dan pencari suaka yang di rencanakan oleh pemerintah Australia di tahun 2001 yang dimana bagian dari kebijakan *Pacific Solution*.<sup>33</sup>

Pihak Australia dan Nauru ingin membangun sebuah hubungan yang kuat dan hal ini tertuang dalam sebuah nota perjajian *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didalamnya memuat dengan

---

<sup>32</sup> Elibritt Karlsen, "Australia's offshore processing of pengungsi dan pencari suakas in Nauru and PNG: a quick guide to statistic and resources," *Parliamentary of Australia*, 19 Desember 2016 diakses pada 30 Juli 2022

[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1617/Quick\\_Guides/Offshore](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore)

<sup>33</sup> Global Detention Project, 2016, Immigration Detention in Nauru diakses dari <http://www.refworld.org/pdfid/5864cf834.pdf> pada 8 Juni 2022

pemindahan, pembebanan dan pemukiman di Nauru. Terdapat beberapa hal dalam MoU kedua belah pihak ini yaitu: **Pertama**, negara anggota dari Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan Protokol 1967, mengakui pentingnya tindakan untuk melakukan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia. **Kedua**, negara yang melakukan hubungan kerjasama bilateral yang sudah berjalan lama perlu berbagi dalam mengatasi masalah migrasi dan memberantas kejahatan transnasional. **Ketiga**, migrasi tidak teratur merupakan tantangan berkelanjutan untuk kawasan Asia Pasifik. **Keempat**, pentingnya kontrol perbatasan dan langkah-langkah penegakan hukum serta koperasi solusi praktis dalam menangani masalah kebutuhan manusia. **Kelima**, pihak Australia harus menghargai tindakan penerimaan oleh Pemerintah Nauru untuk menjadi tuan rumah dalam proses pemindahan, sebagai bagian dari pusat pengolahan regional dan menyediakan akses pemindahan di Nauru sesuai dengan perlindungan internasional dengan peluang pemukiman.<sup>34</sup>

Negara Nauru dijadikan sebagai wilayah pusat penahanan oleh pemerintah Australia yang juga merupakan bagian dari kebijakan *Pacific Solution* yang berlangsung hingga tahun 2008. Pusat penahanan yang terdapat di Pulau Nauru tersebut dikelola oleh *International*

---

<sup>34</sup> Memorandum of Understanding Between The Republic of Nauru and The Commonwealth of Australia, Relating to The Transfer and Assessment of Persons in Nauru and Related Issues, diakses dari <https://dfat.gov.au/geo/nauru/Documents/nauru-mou-20130803.pdf> pada 8 Juni 2022

*Migration Organization* (IOM). Dimulai pada tahun 2001 sampai 2008, selama tujuh tahun beroperasinya fasilitas yang ada di Pulau Nauru ini terdapat sebanyak 1.544 orang yang masih berstatus pencari suaka ditahan. Penahanan ini sebagian besar berada di luar jangkauan pengawasan independen dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akses terhadap pengamanan prosedural ataupun mekanisme hukum yang sesuai dengan penahanan mereka.<sup>35</sup>

Kebijakan *Pacific Solution* yang diimplementasikan oleh Australia di era John Howard ini dinilai sangat ketat dan tegas dalam penanganan isu pencari suaka. Hal ini dapat dilihat dari hasil kebijakan tersebut yang mampu mengurangi jumlah kedatangan manusia perahu yang hendak memasuki wilayah zona migrasi Australia.

**Tabel 4. 1 Jumlah *boat people* yang datang ke Australia tahun 2002-2008**

Tahun	Jumlah Kapal	Jumlah Orang
2002	1	1 Orang
2003	1	53 Orang
2004	1	15 Orang
2005	4	11 Orang
2006	6	60 Orang
2007	5	148 Orang
2008	7	161 Orang

Sumber: Refugee Council of Australia.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Global Detention Project, 2016, *Immigration Detention in Nauru*, diakses dari <http://www.refworld.org/pdfid/5864cf834.pdf> pada 8 Juni 2022

<sup>36</sup> Refugee Council of Australia, diakses dari <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/> pada 2 Agustus 2022

Pada tahun 2001 sebelum kebijakan ini diterapkan, jumlah manusia perahu yang datang ke Australia mencapai lebih dari 5000 orang. Tetapi pasca di implementasikan kebijakan ini jumlah kedatangan manusia perahu menurun sangat drastis hingga hanya satu kedatangan saja di tahun 2002. Meskipun jumlah kedatangan pertahun meningkat dalam kurun waktu 2002- 2008 tetapi jumlah total manusia perahu yang masuk ke zona migrasi Australia terhitung tidak signifikan seperti sebelum di implementasikannya kebijakan *Pacific Solution*.

Dalam jangka waktu tujuh tahun jumlah total kedatangan manusia perahu ke Australia hanya sebanyak 449 orang saja. Jumlah ini bahkan tidak lebih besar dibandingkan dengan kedatangan manusia perahu di tahun 1996 saat pertama kali John Howard menjadi Perdana Menteri di tahun 1996.

Kebijakan *Pacific Solution* sempat dihentikan oleh Kevin Rudd pada tanggal 8 februari 2008, tetapi diberlakukan kembali di masa pemerintahan Julia Gillard dan diteruskan di kepemimpinan Tony Abbot. Pada tahun 2007 kondisi politik Australia berubah setelah Kevin Rudd terpilih menjadi Perdana Menteri Australia, hal ini juga mempengaruhi pendekatan yang dilakukan oleh Australia dalam menangani isu manusia perahu. Kevin Rudd memenuhi janji kampanyenya untuk segera menutup *Offshore Processing Center* yang terletak di pulau Manus Papua New Guinea dan Nauru tidak lama setelah terpilihnya sebagai Perdana Menteri.

Akhir Desember 2007 di bulan terakhir kepemimpinan John Howard jumlah manusia perahu yang

datang ke Australia berjumlah 148 orang dan di tahun berikutnya meningkat meskipun jumlahnya tidak signifikan yaitu sebanyak 161. Partai Buruh beranggapan bahwa pemrosesan pencari suaka di luar wilayah Australia harus segera dihentikan, sementara partai oposisi beranggapan bahwa hal tersebut dapat memicu naiknya jumlah manusia perahu yang akan menuju Australia.

Jumlah kedatangan manusia perahu ke Australia meningkat tajam pasca Kevin Rudd mencabut kebijakan *Pacific Solution*. Di tahun 2009 saja kurang lebih 2900 manusia perahu datang ke Australia, jumlah ini melebihi jumlah total kedatangan manusia perahu di era pemerintahan John Howard di tahun 2001-2007 ketika *Pacific Solution* diimplementasikan. Kebijakan Kevin Rudd dinilai terlalu lunak sehingga pencari suaka cenderung melihat ini sebagai kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan visa permanen untuk dapat tinggal di Australia. Kepemimpinan Kevin Rudd bertahan sekitar tiga tahun saja hingga tahun 2010 dengan menyisakan banyak pekerjaan bagi Perdana Menteri selanjutnya terutama masalah pencari suaka.<sup>37</sup>

### **Bantuan Luar Negeri Australia di Negara Nauru**

AusAID merupakan agensi pembangunan di bawah pemerintahan Australia yaitu Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. AusAID ini menyediakan bantuan pembangunan

secara resmi untuk negara-negara yang berkembang, terutama di wilayah kawasan Pasifik. Bantuan ini diberikan melalui program yang berkelanjutan secara terencana untuk jangka panjang dalam segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesetaraan gender, hukum dan ketertiban, pembangunan pedesaan serta lingkungan hidup.

AusAID akan memberikan \$1,725 miliar sebagai bantuan pembangunan resmi (ODA) pada 2001-2002. Ini merupakan peningkatan sebesar \$125 juta dari angka anggaran 2000-2001, peningkatan lebih dari enam persen secara riil. Perkiraan ODA Australia terhadap rasio produk nasional bruto pada 2001-2002 akan menjadi 0,25 persen. Ini menempatkan Australia jauh di atas rata-rata donor terbaru sebesar 0,22 persen. ODA merupakan salah satu bagian dari keseluruhan bantuan Pemerintah Australia untuk negara-negara berkembang.

Upaya total lebih baik tercermin oleh ODA ditambah aliran resmi lainnya dan pengurangan pajak pemerintah untuk organisasi non-pemerintah untuk membantu negara-negara berkembang. Total bantuan Pemerintah Australia untuk negara-negara berkembang pada tahun 2001-2002 akan menjadi sekitar \$2,75 miliar, atau 0,40 persen dari GNP. Pada tahun 2001-2002, fitur-fitur utama yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian regional, stabilitas dan pembangunan ekonomi Program bantuan Australia bertujuan untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan

<sup>37</sup> Ware, Helen. 2005. "Demography, Migration, and Conflict in the Pacific". *Journal of Peace Research*, vol. 42, no. 4, 2005, pp. 435-45.

fokusnya pada negara-negara di Asia dan Pasifik, program bantuan ini merupakan bagian integral dari keterlibatan Australia di kawasan dan demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk membantu membangun stabilitas dan kemakmuran kawasan.

Program bantuan ini juga merupakan ekspresi dari keyakinan masyarakat Australia bahwa adalah tepat bagi Australia untuk membantu jutaan orang, terutama di antara tetangganya, yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bantuan sebesar AUD\$3.4 juta untuk negara Nauru akan terus berlanjut, termasuk dukungan untuk beasiswa tersier, dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan sektor ekonomi dan publik. pembaruan.

Pemerintah Australia akan memberikan \$1,894miliar sebagai Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) pada tahun 2003-2004, meningkat sebesar \$79 juta dari tahun 2002-2003 sebesar \$1,815miliar, dan peningkatan nyata lebih dari 2 persen. Rasio ODA Australia terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNI) untuk 2003-2004 diperkirakan sebesar 0,25 persen, menempatkan Australia di atas rata-rata donor yang, pada tahun terakhir yang tersedia adalah 0,23 persen. Australia saat ini memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya, termasuk komoditas, untuk membantu Nauru memenuhi masalah mendesak dengan penyediaan layanan dan infrastruktur ekonominya.

Pemerintah Australia akan memberikan \$2,491 miliar sebagai Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) pada tahun 2005-2006, meningkat sebesar \$358 juta dari

angka anggaran 2004-2005 (\$2,133 miliar). Ini menunjukkan peningkatan nyata sebesar 5,8 persen dari hasil yang diharapkan tahun 2004-2005 (\$2,253 miliar), atau peningkatan nyata anggaran-ke-anggaran sebesar 11,7 persen. Rasio ODA Australia terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNI) untuk tahun 2005-2006 diperkirakan sebesar 0,28 persen, menempatkan Australia di atas rata-rata donor terbaru yang tersedia (2004) sebesar 0,25 persen.

Program bantuan Australia memajukan kepentingan nasionalnya dengan membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Lima tema panduan membentuk upaya program mempromosikan tata kelola yang lebih baik, membantu negara-negara untuk mengakses dan memaksimalkan manfaat dari perdagangan dan teknologi informasi baru, mendukung penyampaian layanan dasar yang lebih baik, memperkuat keamanan regional, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Nauru mendapatkan perkiraan ODA sebesar \$16,9 juta. Australia akan bekerja dengan Pemerintah Nauru untuk mengidentifikasi opsi bantuan jangka panjang, dan menetapkan strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pada awal tahun 1980-an, negara Australia megabiskan sekitar \$840 juta dalam sebuah program bantuan luar negeri. Pada tahun 1997-1998, anggarannya menjadi 1,4 milyar, dan pada tahun 2006-2007, anggaran tersebut semakin meningkat menjadi 2,9 milyar. Fokus dari bantuan luar negeri Australia ini memiliki empat tujuan. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan

mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja yang terlatih, manajemen bencana alam dan mempromosikan perdagangan. Kedua, mengembangkan negara dengan pemerintahan yang baik dan efektif, sehingga tidak hanya meningkat di pemerintah pusat namun juga pemerintah lokal. Ketiga, melakukan investasi terhadap manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan. Keempat, meningkatkan kerjasama dan stabilitas regional.

Bantuan luar negeri Australia dapat berbentuk berupa bantuan pencegahan hukum, pencegahan konflik dan membantu negara untuk pulih dari pasca konflik. Bantuan ini juga membantu dalam mengurangi ancaman internasional yang dapat mengganggu kedaulatan seperti obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia dan AIDS. Australia akan memberikan bantuan berupa uang, barang, dan personel disaat negara-negara lain membutuhkan bantuan.

Negara yang ada di kawasan Pasifik yang kerap mendapatkan bantuan adalah negara Nauru. Kebijakan bantuan luar negeri terhadap Nauru dimulai tahun 1992, dengan bantuan yang diberikan sebesar \$2,8 juta hingga \$3,4 juta tiap tahunnya. Pada tahun 2001, Nauru dijanjikan untuk menerima bantuan sejumlah \$3,4 juta, namun dikarenakan terbentuknya perjanjian *Pacific Solution*, Nauru diberikan tambahan bantuan menjadi AUS\$16,5. Sebanyak AUS\$16,5 juta diberikan dalam bentuk generator-generator yang nantinya akan digunakan untuk air dan listrik, selebihnya di arahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Australia kembali memerikan paket bantuan tambahan sebesar

AUS\$10 juta. Paket bantuan ini difokuskan kepada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pembagian bantuan tersebut untuk kesehatan sekitar AUD\$4,5 juta yang dimana meliputi beasiswa, serta banyak diadakannya pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga media, kunjungan spesialis tenaga media Australia, latihan penggunaan alat-alat media serta bantuan obat-obatan. Sekitar AUD\$4,5 juta dialokasikan untuk pendidikan yang meliputi beasiswa, penyediaan alat-alat untuk menyokong pendidikan serta dibuatnya pelatihan untuk guru. Bantuan sebesar AUD\$1 juta digunakan untuk mengurangi produksi limbah yang dihasilkan serta mengurangi dampak yang akan ditimbulkan dengan cara memperbaiki manajemen limbah. Bantuan sekitar AUD\$200.000 diberikan Australia untuk memperbaiki tangki-tangki air dan Australia juga melakukan kerjasama dengan Nauru Phosphate Corporation untuk menjaga dan merawat tangki air serta saluran pipa, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan air yang berasal dari air hujan.

Adanya bantuan sebesar AUD\$150.000 digunakan untuk meningkatkan kemampuan polisi Nauru dengan mengadakan pelatihan pemegangan senjata, penggunaan serta meningkatkan skill untuk meningkatkan keamanan di negara Nauru. Bantuan teknis sekitar AUD\$700.000 digunakan untuk menyediakan tenaga ahli dalam pelatihan, peralatan dan software untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam melakukan sensus, statistik, survey, dan perimigrasian.

### **Strategic Benefits Australia Memberikan Bantuan Luar Negeri kepada Nauru**

Bantuan luar negeri Australia kepada Nauru menggambarkan *strategic benefits* Australia yang besar dalam pemberian bantuan luar negerinya yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian *Pacific Solution*, karena bantuan luar negeri dalam perjanjian ini menjadi alat diplomasi Australia untuk menjamin keterikatan Nauru terhadap perjanjian tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan nasional Australia yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi dan pencari suaka ilegal. Selain itu melalui bantuan luar negerinya pula, Australia melakukan neokolonialisme kepada Nauru yang ditandai dengan adanya penguasaan Australia tidak hanya dalam wilayah namun juga penguasaan terhadap sistem pemerintahan Nauru melalui campur tangannya terhadap sektor-sektor vital dan strategis pemerintahan Nauru sehingga memastikan Nauru untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang diwujudkan melalui *Pacific Solution*.

Pemerintah Australia telah mengubah bantuan luar negerinya kepada Nauru tahun 2001 dari tujuan utama program bantuan luar negerinya adalah pembangunan negara menjadi jaminan dari keberlanjutan perjanjian *Pacific Solution*. Mark Thompson memberikan pendapat bahwa bantuan luar negeri Australia menjadi “*an unmitigated bribe*” suap yang tidak tanggung-tanggung untuk memastikan Nauru tetap menjalankan *Pacific Solution*.

Alasan Nauru menerima kebijakan *Pacific Solution* tidak dapat dipisahkan dengan adanya ketergantungan negara Nauru terhadap bantuan yang diberikan serta dana-dana pembangunan lainnya. Bantuan luar negeri ini mampu menjadi instrumen yang menjadikan Australia memiliki kontrol yang besar terhadap Nauru dalam implementasi *Pacific Solution*. Australia berhasil mengambil alih dan dapat mengendalikan penuh jalannya pemerintahan Nauru untuk memastikan bantuan luar negeri Australia ditujukan sesuai dengan kepentingan nasional. Bantuan luar negeri ini dianggap juga sebagai “*boomerang aid*” karena pada akhirnya bantuan yang diberikan pun kembali tidak hanya melalui pemerintah namun juga perusahaan-perusahaan Australia.

Penempatan bantuan luar negeri Australia digunakan untuk mengimpor bahan-bahan makanan serta pembiayaan *Pacific Solution* secara menyeluruh. Pembiayaan ini disediakan oleh perusahaan-perusahaan Australia. Dengan pemberian bantuan luar negeri ini tidak lepas kaitannya dengan sektor-sektor privat, maka indikator kunci dari pemberian bantuan ini mendominasi spending dari bantuan luar negeri.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan yang memotivasi Australia untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Nauru. Pemberian bantuan ini dilaksanakan melalui kebijakan *Pacific Solution* yang difokuskan untuk mengontrol laju pengungsi dan pencari suaka yang

ingin memasuki wilayah Australia. Terdapat dua fokus utama yang dijalankan Australia dalam pemberian bantuan kepada Nauru.

Pertama, Bantuan Australia ini di fokuskan kepada kawasan yang sedang memiliki masalah untuk dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, perdamaian serta stabilitas kawasan. Menurut Australia sendiri kepentingan nasional yang paling utama terletak pada bidang keamanan khususnya untuk memelihara keamanan dan lingkungan strategis yang berada pada radarnya, dimana diartikan bahwa Australia mempunyai kewajiban langsung untuk menjamin adanya situasi yang damai dan aman terhadap negara-negara yang ada disekitarnya supaya merasa aman.

Kedua, motivasi bantuan yang diberikan oleh Australia untuk Nauru pada tahun 2001-2007 adalah motivasi politik yang didasari oleh kebijakan *Pacific Solution* yang merupakan cara Australia untuk membuka kamp pengungsian diluar Australia.

Kebijakan *Pacific Solution* terdiri dari tiga strategi utama. Pertama, penetapan dan perubahan zona migrasi australia. Kedua, Operation Relex yang dilakukan oleh Australian Defense Force. Ketiga, kerjasama dengan negara dunia ketiga di kawasan pasifik selatan. Dari penerapan tiga strategi utama di atas, dengan kebijakan *Pacific Solution* ini memberikan hasil sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menghalau dan menghentikan kedatangan para pencari suaka yang berkeinginan untuk masuk ke wilayah Australia. *Pacific Solution*

ini juga merupakan salah satu cara Australia untuk menjaga keamanan negaranya dikarenakan pengungsi dan pencari suaka ilegal yang datang ke Australia dianggap mengganggu keamanan

Australia telah mengubah program bantuan luar negerinya yang tujuan awalnya adalah membantu pembangunan dan perekonomian negara menjadi jaminan dari keberlanjutan perjanjian *Pacific Solution* pada tahun 2001. Bantuan luar negeri Australia ini dianggap sebagai suap agar Nauru tetap melaksanakan perjanjian *Pacific Solution* yang digunakan Australia untuk memenuhi kepentingannya. Bantuan luar negeri Australia kepada Nauru menggambarkan strategic benefist Australia yang besar dalam pemberian bantuan luar negerinya yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian *Pacific Solution*, karena bantuan luar negeri dalam perjanjian ini menjadi alat diplomasi Australia untuk menjamin keterikatan Nauru terhadap perjanjian tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan nasional Australia yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi dan pencari suaka ilegal.

Bantuan ini diberikan melalui AusAID yang merupakan agensi pembangunan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, dimana lembaga ini menyediakan bantuan pembangunan secara resmi untuk negara-negara yang berkembang terutama di wilayah kawasan Pasifik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic*

*Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 2006

K.J. Holsti, 1987, terj. Wawan Juanda, "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis", Cetakan Kedua Bandung: Binacipta, p. 321.

Mar'iyah, Chusnul. 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.

### **Jurnal**

Connell, John, 2006. "Nauru: *The First Failed Pacific State?*", dalam *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs*, Vol. 95, No. 383,

Savitri Taylor, "The Pacific Solution Or A Pacific Nightmare?: The Difference Between Burden Shifting and Responsibility Sharing", *Asian-Pacific Law & Policy Journal* Vol.6 Issue I, (2005):7

Rahma Dwi Wulandari, "Bantuan Luar Negeri Australia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Nauru Tahun 2001-2007", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016

J. Squires, 2008, "The Constitutive Representation Of Gender: Extra-Parliamentary Re-Presentations Of Gender Relations", *Journal of Representative Democracy* Volume 44, 2008

Teuea Toatu, "Keeping The Nauru Economy Afloat" *Pacific Economic Bulletin* Volume 19 Number 2 2004

Burhanuddi, "Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya Dalam Percaturan Global", Vol. 1, No. 1, Juli 2015

Ware, Helen. 2005. "Demography, Migration, and Conflict in the Pacific". *Journal of Peace Research*, vol. 42, no. 4, 2005, pp. 435–45.

Graeme Hugo, Globalization and changes in Australian international migration, *Journal of Population Research* 2006, 107, p. 125–126. Diakses pada 2 Agustus 2022 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/imre.12120>

Rahmawaty A. 2014. Pelanggaran Australia terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?. *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*

Tanzalia E. 2014. Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMAs) tahun 2001-2008. *JOM FISIP* Vol. 2 No.2

Bergin, Anthony and Sam Bateman. 2005. *Future unknown: The terrorist threat to Australian maritime security*. Australian Strategic Policy Institute. Canberra.

Phillips, J. 2012. *Parliament of Australia*, Department of Parliamentary Service. *The 'Pacific Solution' Revisited: a Statistical Guide to The Pengungsi dan pencari suaka Caseloads on Nauru and Manus Island*.

### **Web**

The World Bank, "Net official development assistance and official aid received (current US\$) in Nauru"

Debra, Jonson, 2007. "Where did \$100m go? Not to the Nauruans", dalam *Brisbane Times*, May 28 2007 Accessed February 9 2022 <https://www.smh.com.au/national/wh>

ere-did-100m-go-not-to-the-nauruans-20070528-gdq8ux.html

Asian Development Bank, 2004. "Asian Development Outlook 2004—Economic Trends and Prospects in Developing Asia", The Pacific. Asian Development Bank, Manila

Parliament of Australia, [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05) Accessed June 2, 2022

Refugee Council of Australia <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/> Accessed June 9, 2022

Vivanews, "Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/53394-indonesia-jadi-tempat-transit-imigran-gelap> Accessed June 3, 2022

Sartika Soesilowati, "Sekuritisasi "manusia perahu": efektifkah?", Departemen hubungan internasional, Universitas Airlangga, diakses dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jgs173964b502full.pdf> Accessed June 7, 2022

Australian Federal Police (AFP). "People Smuggling", diakses dari <http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking/people-smuggling.aspx> Accessed June 7, 2022

Alex Reilly, Australian politics explainer: the MV Tampa and the transformation of asylumseeker policy, 2017, The Conversation, <https://theconversation.com/australia-n-politics-explainer-the-mv-tampa->

[and-the-transformation-of-asylum-seeker-policy-74078](#), Accessed August 2, 2022

Adi P. Suwecawangsa, "Kebijakan Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Pengungsi dan pencari suaka) Berupa *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders (OSB)*", Accessed September 4, 2022 <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/18860/>

Wood J. A. 2001 The Pacific Solution: Refugees Unwelcome in Australia. <<http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3wood.pdf>> Accessed June 2, 2022

The Sydney Morning Herald, "Secret file: Operation Relex," The Sydney Morning Herald, 28 Oktober 2022, Accessed August 1, 2022 <https://www.smh.com.au/national/secret-file-operation-relex-20021028-gdfrkt.html>

Elibritt Karlsen, "Australia's offshore processing of pengungsi dan pencari suakas in Nauru and PNG: a quick guide to statistic and resources," Parliamentary of Australia, 19 Desember 2016 Accessed July 30, 2022

[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1617/Quick\\_Guides/Offshore](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore)

Global Detention Project, 2016, Immigration Detention in Nauru Accessed June 8, 2022 <http://www.refworld.org/pdfid/5864cf834.pdf>

Memorandum of Understanding Between The Republic of Nauru and The Commonwealth of Australia, Relating to The Transfer and

Assessment of Persons in Nauru and Related Issues, Accessed June 8, 2022

<https://dfat.gov.au/geo/nauru/Documents/nauru-mou-20130803.pdf>

Global Detention Project, 2016, Immigration Detention in Nauru, June 8, 2022

<http://www.refworld.org/pdfid/5864cf834.pdf>

Refugee Council of Australia, August 8, 2022

<https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/>